

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERISTIWA MALAPETAKA 15 JANUARI (MALARI) 1974

Aas Lailah, Iskandar Syah, Syaiful M

FKIP Unila Jalan. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

e-mail: aaslailah81@yahoo.com

Hp. 085768365174

Abstract : Alaysis of Contributing to Disastrous Events in January 15, 1974. Based on the formulation, so that this study aimed for determining the all factors that cause the catastrophe event (Malari) in January 15, 1974 at terms of the political aspect. This study used the historical method with the literature's and the documentation's data collection techniques, while the data analysis is the qualitative data analysis. Based on the data that has been obtained, the results showed that the factors contributing to the catastrophe events (Malari) in January 15, 1974 for the political aspect is because 1) the existence competition of the government between Soemitro's group and Ali Murtopo's group. At the time of the Riots on January 15, 1974, the group Murtopo intentionally sent some people who are not being the students, while the Soemitro's deliberately let the riots occurred and did not take a firm action. 2) The disclaimer for the foreign factories domination. The disclaimer is realized in a wide variety of exclamations. As in the form of criticism from some economists, several articles on the newspaper, discussions, and demonstrations which is undertaken by various groups, especially students.

Keywords : *Malari event, students, causes*

Abstrak : Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 ditinjau dari aspek politik. Metode yang digunakan adalah metode historis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 di tinjau dari aspek politik disebabkan karena 1) adanya persaingan di dalam tubuh pemerintahan yakni antara kelompok Soemitro dan Ali Moertopo. Pada saat terjadinya peristiwa kerusuhan pada tanggal 15 Januari tersebut, kelompok Ali Moertopo sengaja mengirimkan beberapa oknum yang bukan berstatus mahasiswa di dalam peristiwa tersebut. Sedangkan kelompok Soemitro sengaja membiarkan peristiwa kerusuhan tersebut dengan tidak melakukan penindakan-penindakan tegas, seperti penangkapan. 2) Adanya penolakan terhadap dominasi perusahaan asing. Penolakan tersebut diwujudkan dalam aneka macam seruan. Seperti dalam bentuk kritikan atau masukan dari beberapa ahli ekonom, tulisan-tulisan beberapa surat kabar, diskusi-diskusi serta aksi demonstrasi yang di lakukan oleh berbagai kalangan terutama mahasiswa.

Kata Kunci : *peristiwa Malari, mahasiswa, penyebab*

PENDAHULUAN

Masa kekuasaan Orde Lama secara legal dan formal berakhir dan digantikan oleh masa kekuasaan Orde Baru, yakni sejak dilantik dan disumpahnya Jenderal Soeharto

sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno (Orde Lama) dengan masa Soeharto. Orde Baru lahir dari tekad untuk

melakukan koreksi total atas kekurangan sistem politik yang telah dijalankan sebelumnya. Dengan kebulatan tekad atau komitmen dari segala kekurangan pada masa sebelumnya, Orde Baru merumuskan tujuannya secara jelas yakni melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagaimana diungkapkan oleh Soeharto dalam salah satu pidatonya “Koreksi secara mendasar terhadap kekeliruan masa lampau itulah yang melahirkan Orde Baru. Ialah, tatanan kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang kita letakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Sejarah lahirnya Orde Baru ini harus kita camkan sedalam-dalamnya dalam lubuk hati dan kesadaran kita semua tanpa kecuali” (Departemen Pertanian, 1994 : 6).

Menurut A. Yogaswara, Soeharto mencatat, inflasi di tahun 1965 mencapai 500% dan harga beras naik 900%. Sementara defisit anggaran belanja tahun itu mencapai 300% dari pemasukan. Hal ini belum ditambah lagi utang luar negeri yang menumpuk dan harus dibayarkan pada tahun 1966 (A. Yogaswara, 2009 : 22). Menangani keadaan demikian, maka menurut Soeharto solusi (atau satu-satunya solusi) adalah “harus cepat mendapatkan bantuan luar negeri” (Ramadhan K.H, 1989 : 182).

Untuk mendukung hal tersebut, menurut Muhaimin, *dikutip* dari buku *Indonesia Raya di Bredel* “muncul Undang-undang Penanaman Modal Asing nomor 1 tahun 1967 dan juga Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri nomor 6 tahun 1968 yang dimaksudkan untuk membuka perekonomian dan menggiatkan kembali dunia usaha swasta” (Ignatius Haryanto, 2006 : 150).

Selanjutnya, Indonesia memberikan peluang kepada negara-negara asing yang ingin bekerjasama menanamkan investasi perusahaannya di Indonesia. Amerika dan Jepang merupakan dua negara yang memiliki nilai investasi terbesar saat itu. Sebagaimana diungkapkan oleh *Harold Crouch* dalam artikel *The 15 Januari Affair in Indonesia*, bahwa nilai proyek Amerika di Indonesia pada tahun 1973 mencapai US \$ 935 juta untuk 115 proyek, sementara Jepang dengan jumlah proyek terbanyak 135 proyek

mencatat nilai US \$ 534 juta (A. Yogaswara, 2009 : 23).

Dana investasi terbanyak dari Jepang pun mengalir ke Indonesia. Dengan adanya sokongan dana melimpah yang diperoleh dari pinjaman dana asing, Presiden Soeharto mulai menggulirkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang sebelumnya dengan tegas dicanangkan dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) yang dilakukan secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

Pelaksanaan Pelita I yang diharapkan dapat berjalan dengan baik ternyata dicerai dengan terjadinya peristiwa Malari yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Peristiwa tersebut terjadi bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang, *Kakuei Tanaka* ke Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DM UI), Hariman Siregar.

Menjadi sebuah kewajaran ketika para mahasiswa menyuarkan tuntutan dan aspirasinya kepada pemerintah demi sebuah perubahan lebih baik kearah yang diinginkan. Diungkapkan oleh Henry A. Landsberger bahwa gerakan protes muncul atas reaksi terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Faktor ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik dalam sepanjang sejarah melahirkan pemberontakan dan kekerasan massa radikal yang merupakan reaksi spontan, kefrustasian dalam kehidupan rakyat (Daliso Mangunkusumo, 1999 : 85).

Terjadinya krisis ekonomi, sosial dan politik mendorong para mahasiswa untuk melakukan suatu gerakan politik yang diwujudkan dalam suatu gerakan mahasiswa. Dalam usahanya menyelesaikan krisis yang terjadi, kekuatan politik mahasiswa yang terwujud dalam suatu gerakan mahasiswa melakukan berbagai aksi sosial maupun politik yang tidak jarang agenda aksinya adalah bentuk protes terhadap pemerintah yang dianggap belum mampu menyelesaikan krisis karena berbagai penyimpangan yang dilakukannya (Rum Aly, 2004 : 3). Peristiwa yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari 1974

ini telah mengakibatkan banyak kerugian baik materil maupun non-materil. Dari data resmi pemerintah tercatat 11 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat, 120 orang luka ringan, kendaraan yang dibakar atau dirusak berjumlah 807 mobil dan 187 motor, serta bangunan yang rusak atau dibakar berjumlah 145 gedung. Dari situ ditahanlah sejumlah 775 orang (Marzuki Arifin, 1974 : 338-339). Belum lagi dibredelnya sejumlah surat kabar dan dialih fungsikannya beberapa pejabat pemerintahan seperti Jenderal Soemitro, Ali Moertopo, Soedjono Hoemardhani dan Yoga Soegama serta dihapuskannya lembaga Aspri presiden akibat peristiwa tersebut.

Hingga sampai berakhirnya peristiwa ini telah menyisakan banyak pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang terjadi dan siapakah orang yang seharusnya bertanggungjawab dibalik terjadinya peristiwa tersebut. Sejumlah tulisan pernah membahas tentang peristiwa tersebut dari masing-masing perspektif. Ada yang melihatnya bahwa terjadinya peristiwa tersebut yaitu akses dari penggunaan modal asing di negara berkembang seperti Indonesia yang baru memulai pembangunan ekonominya sejak Orde Baru, dan masuknya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 (Yahya Muhaimin, 1991 : 134). *Francois Raillon* memandang bahwa peristiwa Malari 1974 adalah hal tentang peranan yang dilakukan oleh mahasiswa sepanjang tahun 1970-an. Malapetaka 15 Januari adalah tentang aktivitas mahasiswa dalam menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang yang berakhir dengan terjadinya kerusuhan di beberapa wilayah Ibukota. Serta ada pula yang menyebutkan seperti *Harold Crouch*, bahwa peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 adalah karena adanya konflik elite tentang pengelompokan kekuasaan saat itu dan bagaimana kelompok tersebut saling berebut pengaruh (Ignatius Haryanto, 2006 : 47).

Banyaknya versi tentang peristiwa yang mengakibatkan kerusuhan tersebut menyisakan pertanyaan yang tidak berujung tentang penyebab utuh dari peristiwa tersebut. Bukan pekerjaan mudah bagi penulis untuk langsung menjelaskan secara utuh bagian-bagian cerita tentang terjadinya peristiwa yang dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 tersebut. Untuk itu, dari sekian

banyaknya argumentasi tentang penggambaran mengenai terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 tersebut, penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh mengenai peristiwa tersebut dari faktor penyebab terjadinya peristiwa Malari 1974 di tinjau dari aspek politik.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode merupakan faktor penting dalam memecahkan suatu masalah yang turut menentukan keberhasilan suatu penelitian. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Husin Sayuti, 1989 : 32). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian historis mengingat objek dalam penelitian ini merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. "Metode penelitian historis adalah sekumpulan prinsip-prinsip aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya (biasanya dalam bentuk tertulis)" (Nugroho Notosusanto, 1984 : 11). Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pelaksanaan metode historis antara lain yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Nugroho Notosusanto, 1984 : 84).

Untuk lebih mempermudah cara kerja dalam suatu penelitian, maka variabel merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja karena dengan variabel kita lebih dapat memfokuskan pada apa yang menjadi objek penelitian kita. Variabel adalah himpunan sejumlah gejala yang memiliki beberapa aspek atau unsur di ndalamnya yang bersumber dari kondisi objek penelitian, tetapi dapat pula berada di luar dan berpengaruh pada objek penelitian (Nugroho Notosusanto, 1984 : 55). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal dengan fokus penelitian pada faktor-faktor penyebab terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 ditinjau dari aspek politik. Pengumpulan data selalu memiliki hubungan dengan dengan masalah

yang hendak dipecahkan atau diteliti. Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan agar lebih akurat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan agar lebih akurat yakni dengan menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi. Teknik kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed, 2004 : 24). Sedangkan teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwandi, 2008 : 158).

Langkah yang harus ditempuh setelah pengumpulan data yaitu analisis data. Analisis data merupakan bagian penting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. "Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data" (Moeleong, 2004 : 280). Dalam hal ini, analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengingat data tersebut berupa fenomena-fenomena yang terjadi yang dikumpulkan dalam bentuk laporan dari karangan para sajarawan sehingga memerlukan pemikiran yang tepat dalam menyelesaikan masalah penelitian tersebut. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (*Bodgan dan Biklen*, 1982 dalam Moeleong, 2004 : 248).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Orde Baru adalah suatu penataan kembali seluruh kehidupan bangsa dan negara serta menjadi titik awal koreksi terhadap penyelewengan pada masa yang lalu. Orde Baru bisa diartikan sebagai orde yang mempunyai sikap dan tekad mendalam untuk mengabdikan kepada rakyat serta mengabdikan kepada kepentingan nasional yang didasari oleh falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi asas serta sendi Undang-undang Dasar 1945. "Orde Baru juga bisa diartikan sebagai masyarakat yang tertib dan negara yang berdasarkan hukum, dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta warga negara mempunyai pemimpin atau penguasa yang tunduk kepada ketentuan yang berlaku" (Jenderal Soeharto, 1967 : 7).

Maka langkah-langkah yang diambil kemudian lebih difokuskan pada penguatan faktor politik dan militer pemerintah. Lalu didirikanlah berbagai lembaga-lembaga pemerintah untuk tujuan stabilitas pemerintahan. Salah satunya adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND), dimana A. Yogaswara menyebutnya sebagai lembaga "tidak resmi" berbentuk seperti Kopkamtib, Opsus dan Aspri yang sepenuhnya bersifat loyal pada dirinya. Lembaga-lembaga tidak resmi ini memiliki akses langsung terhadap Soeharto. Aspri dan Opsus bahkan memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, termasuk pengaruhnya terhadap presiden melebihi pengaruh kabinet serta lembaga-lembaga resmi pemerintahan (A. Yogaswara, 2007 : 183).

Mengenai keberadaan lembaga-lembaga pemerintah ini di dalam pemerintahan Orde Baru, Soemitro mengakui perannya sangat besar dalam mengembangkan Orde Baru dengan segala manuvernya (Heru Cahyono, 1998 : 47). Sepak terjang Ali Moertopo dan teman-temannya telah menimbulkan kecurigaan di benak jenderal-jenderal lain, termasuk Soemitro. Soemitro ketika itu menjabat sebagai Pangkopkamtib merasa tidak suka dengan manuver-manuver vulgar dari kelompok Ali Moertopo (A. Yogaswara, 2009 : 39). Meskipun terkadang terlalu vulgar dalam mencapai tujuannya. Tak jarang kebijakan yang mereka rumuskan berlawanan dengan kebijakan yang dihasilkan

oleh lembaga-lembaga resmi milik pemerintah. Dualisme di tubuh pemerintahan pun tak dapat dihindarkan (A. Yogaswara, 2009 : 21).

Rivalitas keduanya pun meruncing dan melahirkan dua kubu di tahun 1971. Sementara Soemitro, Pangkopkamtib merangkap sebagai Wakil Panglima ABRI dekat dengan Kepala Bakin Sutopo Juwono, sedangkan Ali Moertopo (Aspri/Opsus) dan Soedjono Hoemardhani (Aspri) sejalan dengan Menhankam/Panglima ABRI, M. Panggabean. Tarik menarik antar dua kubu pun terjadi setiap saat. Perang intelijen tak dapat dihindarkan (A. Yogaswara, 2009 : 40).

Persaingan yang terjadi antara kelompok Soemitro dan Ali Moertopo turut menyebabkan terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974. Ali Moertopo sengaja mengirim anak-anak gelandangan, preman Ibu Kota dan bekas simpatisan DI/TII untuk melakukan huru-hara dan kerusuhan pada aksi demonstrasi mahasiswa yang menyambut kedatangan PM Jepang Tanaka. Aksi huru-hara dan kerusuhan itu sengaja dirancang oleh Ali Moertopo untuk menyingkirkan lawan-lawannya. Sementara itu, Soemitro justru membuat kesan “memberi angin” pada gerakan mahasiswa. Menjelang kedatangan PM Jepang Tanaka, Soemitro justru mengurangi pembatasan-pembatasan terhadap demonstrasi mahasiswa. Bahkan ketika terjadi huru-hara dan kerusuhan, pasukan kemanan dibawah komando Soemitro tidak langsung bersikap tegas. Pangkopkamtib menunjukkan nada persahabatan ketika berbicara dengan para demonstran. Dua hari setelah peristiwa itu, pasukan kemanan baru melakukan penangkapan-penangkapan. Sebenarnya dibalik aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Januari 1974, Soemitro berharap agar protes mahasiswa tersebut dapat memaksa Presiden Soeharto untuk membubarkan Aspri sekaligus menyingkirkan rivalnya itu (Iin Farinda Astutik dalam M. Aref Rahmat, 2011 : 50-51).

Dipaparkan oleh Salim Hutadjulu, bahwa “Jadi memang pada waktu saya dipindahkan ke LP budi Utomo, di sebelah kanan ini Kyai Nur dan sebelah saya lagi Roy

Simandjuntak. Saya mendapat cerita yang betul-betul saya sangat terkejut mendengar bahwa mereka itu ikut terlibat di dalam gerakan pembakaran tanggal 15 Januari itu. Waktu mendengar pengakuan Saudara Roy Simandjuntak ini baru saya tahu bahwa mereka memakai hari yang sama untuk melakukan gerakan pembakaran ini sekaligus untuk memberitahukan kepada media massa ternyata mahasiswa itu anarkis bukan melakukan *apel* di Trisakti seperti yang dikatakan tapi melakukan pembakaran. “Kalau Simandjuntak ini Ketua KAPBI (Kesatuan Pengemudi Becak Indonesia). Jadi, mengerahkan seluruh tukang-tukang becak untuk melakukan pembakaran-pembakaran pada tanggal 15. Kalau Pak Kyai Nur ini adalah seorang kyai di pondok pesantren yang ada di Banten, Tangerang. Jadi, mereka juga pada waktu hari yang sama itu menggerakkan massanya untuk membantu mendukung gerakan Simandjuntak ini karena saya tahu mereka memang kenal. Mereka istilahnya bosnya *lah*. Apa yang saya tangkap dari seluruh pemeriksaan dan omongan-omongan di dalam tahanan jelas pada saat itu keterlibatan (maaf ya kalau saya bilang) Ali Moertopo dan Soejdono Hoemardhani jelaslah pada waktu itu mereka betul-betul terancam dengan gerakan mahasiswa ini. Karena *kan* kami mahasiswa menginginkan membubarkan Aspri dan mereka merasa tidak senang *lah gitu*” (Hasil wawancara dalam <http://www.youtube.com/watch?Diakses pada 28 Desember 2012>).

Selain adanya persaingan yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan, pada masa awal Orde Baru terjadi pula penolakan terhadap dominasi perusahaan-perusahaan asing akibat pemberlakuan Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Menurut Prof. Sarbini Sumawinata dan Dr. Soedjatmoko berpendapat bahwa strategi ekonomi yang dibawa Orde Baru akan menghancurkan industri golongan pribumi di dalam negeri, dan akan menciptakan suatu daerah kantong dengan pola konsumsi yang asing bagi masyarakat, sementara golongan pribumi mendapat proteksi atau kesempatan untuk bekerja dan menanamkan modalnya (Ignatius Haryanto, 2006 : 153). Disebutkan pula bahwa industri minimum dari luar negeri

mematikan industri serupa di dalam negeri seperti Limonade, Markisa, Sirsak dan lain-lain (Yahya Muhaimin, 1991 : 196). Serta dalam setiap *join venture*, pihak Indonesia selalu lebih kecil modalnya dan hanya satu perusahaan dimana Indonesia memegang tampuk pimpinan perusahaan. Selebihnya dikuasai pemilik modal asing (Ignatius Haryanto, 2006 : 119).

Diantara para penginvestasi, Jepang merupakan salah satu negara dominan yang menginvestasikan modalnya di Indonesia. “Kesepahaman dan saling mengerti diantara kedua negara kemudian diikuti dengan derasnya aliran modal Jepang (dan modal asing lainnya) masuk ke Indonesia. Menurut *Harold Crouch*, sampai tahun 1973, persetujuan telah diberikan kepada 135 proyek Jepang dengan nilai US \$ 534 juta” (Ignatius Haryanto, 2006 : 209). Dan Salah satu proyek besar yang menjadi indikator hubungan ekonomi Indonesia-Jepang dalam jumlah yang begitu besar adalah proyek Asahan di Sumatera Utara. Proyek ini sendiri dimaksudkan untuk membangun potensi industri di Indonesia bekerja sama dengan konsorsium modal swasta di Jepang yang pada akhirnya merupakan kerja sama antara dua pemerintah negara (Ignatius Haryanto, 2006 : 122). Dikemukakan oleh Nindarsari bahwa ada tiga permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal Jepang di Indonesia, yakni ;

- a. Lumpuhnya industri tekstil pribumi akibat penanaman modal asing tersebut.
- b. Hubungan bisnis dari kelompok Jepang inilah yang mengambil partner dari WNI keturunan Cina.
- c. Reaksi masyarakat terhadap peristiwa 15 Januari 1974, yang terlihat lebih pada konflik elite antara kelompok loby Jepang dengan grup Hankam.

(Nindarsari. *Implikasi Politik Penanaman Modal Jepang di Indonesia 1970-1979*, Skripsi Sarjana Ilmu Politik. FISIP UI, 1984, Hal. 119).

Fokus kritik gerakan mahasiswa ditujukan terhadap strategi pembangunan yang diambil. Misalnya pada tahun 1973, para mahasiswa mengadakan aksi ke gedung MPR/DPR untuk menyampaikan “Petisi 24 Oktober”. Isi petisi tersebut adalah kritik

terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap tidak adil dan hanya menguntungkan kelompok yang kaya (Budiman Sudjatmika, 20 Desember 2000). Lalu kemudian demonstrasi yang dilakukan atas penyambutan Menteri Kerjasama Pembangunan Belanda sekaligus Ketua IGGI (*Inter-Government Group on Indonesia*), *J.P. Pronk* ke Jakarta pada bulan November 1973. Dan semakin memuncak dengan adanya diskusi-diskusi mengenai modal asing dan korupsi semakin memuncak diakhir tahun 1973 (A. Yogaswara, 2009 : 50).

Dan protes-protes menentang modal asing semakin terus kencang di lakukan pada awal-awal di bulan Januari 1974. Aksi mahasiswa pun semakin meluas diberbagai kota seperti Yogyakarta, Bandung, Makassar dan Medan. Banyak poster-poster dibentangkan dalam beraneka ragam seruan seperti : “Bubarkan Aspri”, “Sudjono Hoemardhani Dalang Makelar Jepang”, “Ali Moertopo Calo Politik”, “Jepang Merusak Indonesia” dan lain sebagainya. Bahkan terdapat sekelompok mahasiswa yang mendatangi Kejaksaan Agung, menyerahkan daftar nama cukong-cukong Cina yang dianggap menjadi biang keladi korupsi (A. Yogaswara, 2009 : 80).

Maka, akumulasi sikap anti pun Jepang kemudian mencapai klimaks pada saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, *Kakuei Tanaka* pada tanggal 15 Januari 1974. Kunjungan *Tanaka* disambut mahasiswa dengan demonstrasi. Mahasiswa bergerak dengan isu utama anti modal asing karena dinilai merugikan ekonomi Indonesia. Disamping anti modal asing, mahasiswa berdemonstrasi dengan isu-isu lain sebagai tuntutan mereka, diantaranya ; “Ganyang korupsi/Stop pemborosan pembangunan”, “Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga, Jepang merusak Indonesia” (Adi Suryadi Culla, 1999 : 82-85).

Berdasarkan data pada hasil, pembentukkan ketiga Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yakni Kopkamtib, Opsus dan Aspri pada awal kepemimpinan Orde Baru telah menuai banyak protes di beberapa kalangan terutama mahasiswa. Pada dasarnya, pembentukkan ketiga Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) pada

masa awal Orde Baru bertujuan untuk mengawal kelancaran dari pada proses pembangunan pemerintahan di segala bidang demi mencapai stabilitas yang diharapkan. Namun pada proses perkembangannya, hadirnya kelembagaan tersebut justru membuat jurang pertikaian di tubuh pemerintahan. Hal ini di karenakan terjadinya pergeseran fungsi dari ketiga kelembagaan tersebut yang berubah dari fungsi awal tujuan pembentukannya.

Sebagaimana lembaga Komando Pemulihan Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang semula di bentuk atas dasar memulihkan keamanan dan ketertiban akibat Gerakan 30 September 1965 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres)/Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi No. 179/KOTI/1965, berubah kewenangannya menjadi lembaga yang mengawasi pemberitaan, pengamanan proses Pemilihan Umum (Pemilu), di berikan kewenangan untuk menangkap, menginterogasi, menahan dan lain sebagainya.

Demikian pula halnya dengan lembaga Opsus, yang pada hakikatnya merupakan lembaga intelijen. Sebagaimana yang kita pahami bahwa lembaga intelijen merupakan personifikasi dari sebuah dinas rahasia yang tugasnya dirahasiakan untuk umum, kecuali pelaksana dan pemberi tugas tersebut yang mengetahui. Operasi Khusus (Opsus) dibentuk pada tahun 1963 yang semula di gunakan untuk membangun kontak rahasia dengan pemerintahan Malaysia selama konfrontasi. Dan seiring berjalannya waktu, Opsus pun di fungsikan sebagai lembaga yang membantu untuk memastikan suara pro-pemerintah pada Pepera Papua tahun 1969, pada Pemilihan Umum (Pemili) 1971 dalam merestrukturisasi partai-partai politik, memperkuat Sekber Golkar dengan fungsi penggalangannya mendirikan surat-surat kabar guna propaganda stabilitas dan pembangunan pemerintahan, serta melakukan intervensi dan filtrasi dalam rapat-rapat yang dilakukan partai maupun organisasi politik.

Dan terakhir, lembaga Asisten Pribadi (Aspri) presiden yang juga di tuntutan pembubarannya oleh kalangan mahasiswa

pada peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974. Aspri presiden pada masa awal kepemimpinan Orde Baru di jadikan sebagai tumpuan utama presiden di bandingkan kabinet lainnya dalam sebuah proses pembuatan keputusan. Hal ini di nilai, bahwa presiden menaruh kepercayaan lebih banyak terhadap Aspri-nya di bandingkan pada kabinetnya. Tentu saja hal tersebut menimbulkan ketidaksenangan di kalangan kabinet pemerintahan lainnya. Sehingga melahirkan sikap saling bersaing untuk berebut pengaruh di kalangan elite pemerintahan.

Dan persaingan yang paling terlihat di tubuh pemerintahan pada masa awal Orde Baru adalah persaingan yang terjadi antara Kelompok Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo. Jenderal Soemitro yang berada pada posisi sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) merangkap Wakil Panglima ABRI lebih dekat dengan Mayjen Sutopo Juwono yang berada di Bakin sebagai Ka Bakin (Kepala Bakin) serta Sajiman, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Sehingga dapat dikatakan mereka berada dalam kelompok Jenderal Soemitro. Sedangkan untuk kelompok Ali Moertopo sendiri di dukung oleh Soedjono Hoemardhani yang berada di lembaga Aspri dan Opsus seperti halnya Ali Moertopo yang merangkap sebagai Deputi Bakin serta Panglima ABRI, Jenderal Maraden Panggabean. Dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya, ketiga lembaga tersebut saling tumpang-tindih. Dalam artian, tugas dan wewenang ketiga lembaga seringkali berbenturan dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Bahkan kelompok Ali Moertopo di nilai terlalu mendominasi dan berlebihan dalam sistem hierarki militer maupun pemerintahan.

Persaingan atau pun rivalitas yang terjadi di antara kedua kelompok sepanjang masa awal Orde baru merupakan sebuah hal yang hampir semua orang mengetahuinya, terutama di kalangan pemerintahan pada saat itu. Dan rivalitas atau persaingan ke dua kelompok antara Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo terhadap peristiwa kerusuhan bulan Januari 1974 yang disebut sebagai

Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 tentu memiliki sebuah garis lurus yang harus di ketahui. Sebagaimana banyak tulisan menyatakan bahwa peristiwa Malari 1974 adalah sebuah peristiwa kerusuhan yang di lakukan oleh mahasiswa yang disebabkan karena tuntutan terhadap pemerintah dalam hal penanaman modal asing.

Disebutkan oleh beberapa saksi bahwa di dalam kerusuhan tanggal 15 Januari 1974 banyak terdapat golongan yang bukan termasuk mahasiswa, seperti adanya para preman, tukang-tukang becak bahkan juga seorang kyai yang berada di luar daerah ibukota yang sengaja di datangkan. Mereka sengaja menyusup dan di susupkan ke dalam gerakan mahasiswa saat itu. Dan tak hanya itu, menurut penuturan dari para pelaku (mahasiswa) yang justru melakukan perbuatan kerusuhan seperti penjarahan, pengrusakan dan pembakaran gedung-gedung adalah bukan mahasiswa melainkan oknum-oknum tertentu, yang kemudian diketahui bahwa beberapa oknum yang terlibat di dalam kerusuhan tersebut sengaja di gerakkan dan di perintah oleh kelompok Ali Moertopo.

Seperti keterlibatan Roy Simandjuntak, seorang ketua persatuan pengemudi becak Indonesia yang sengaja mengerahkan seluruh tukang-tukang becak untuk melakukan pembakaran-pembakaran pada tanggal 15 serta seorang Kyai Nur dari pondok pesantren di Banten, Tangerang yang mengaku terlibat di dalam kerusuhan Malari 1974. Menurut pengakuan keduanya kepada Salim Hutadjulu, mereka di perintah oleh seseorang yang bernama Ramadi. Sebagaimana diketahui bahwa Ramadi adalah bekas kolonel Bidang Hukum Militer dan juga salah satu anggota MPR dari Partai Golkar sejak tahun 1971 serta salah satu pimpinan Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam (GUPPI). Dan menurut Salim Hutadjulu, sosok Ramadi dekat dengan dua Aspri presiden yaitu Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani.

Gerakan kelompok Soemitro sendiri pada peristiwa Malari 1974 menempatkan mereka pada posisinya. Aktivitas Jenderal Soemitro yang sering berada di kampus-kampus diindikasikan untuk menggalang

simpati dan dukungan dari kalangan kampus. Setidaknya agar dirinya di nilai sebagai sosok yang bijak dan memperoleh banyak dukungan. Dan juga sebuah kesengajaan yang di lakukan oleh pasukan keamanan dalam hal penanganan terhadap kerusuhan yang di nilai sengaja dibiarkan tanpa lekas segera di tindak tegas. Sehingga kerusuhan pun semakin meluas di berbagai penjuru ibukota saat itu. Barulah, setelah kerusuhan terjadi dan berkobar Pangkopkamtib Jenderal Soemitro datang dan berdiri di atas sebuah panser di tengah kerumunan massa meneriakkan massa untuk segera membubarkan diri. Dan penangkapan-penangkapan terhadap para pelaku baru di lakukan setelah dua hari kerusuhan tersebut terjadi. Diungkapkan pula oleh Iin Farinda Astutik bahwa sebenarnya dibalik aksi demosntrasi mahasiswa pada 15 Januari 1974, Soemitro berharap agar protes mahasiswa tersebut dapat memaksa Presiden Soeharto untuk membubarkan Aspri presiden sekaligus menyingkirkan rivalnya itu. Karena di dalam lembaga Aspri presiden terdapat rivalnya yakni Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani.

Di sisi lain, hadirnya UU PMA pada masa awal Orde Baru turut pula memicu reaksi dari masyarakat terhadap penolakan kebijakan tersebut. Pada tahun 1970-an salah satu negara penginvestasi terbesar di Indonesia selain negara Amerika ialah Negara Jepang yang merupakan negara dengan jumlah proyek terbanyak mengalahkan Amerika Serikat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa negara-negara Barat saling bersaing dengan negara Jepang untuk kepentingan ekonomi mereka dengan memanfaatkan kekayaan alam yang di miliki Negara Indonesia. Terlebih dengan pemberlakuan Undang-undang No. 1 tahun 1967 yang memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi pengusaha asing untuk dengan mudah dapat menguasai perekonomian Indonesia.

Para ahli ekonom banyak menilai bahwa strategi ekonomi yang di terapkan pada masa awal Orde Baru hanya akan menghancurkan industri golongan pribumi di dalam negeri sehingga keluhan yang di ungkapkan dari pengusaha domestik mengenai industri asing yang mematikan industri mereka semakin menyeruak ke

permukaan. Seperti keluhan yang terjadi pada perusahaan industri minuman domestik semacam Limonade, Markisa, Sirsak yang terpuruk akibat hadirnya industri luar negeri. Di tambah dengan pola kerjasama yang dilakukan antara pengusaha domestik dan asing yang menempatkan pengusaha domestik selalu lebih sedikit memegang tampuk pimpinan perusahaan di dibandingkan dengan pengusaha asing. Terlebih berdasarkan data yang di peroleh, Negara Jepang merupakan negara penginvestasi terbesar mengalahkan Negara Amerika Serikat.

Berbagai bentuk reaksi atas dominasi negara Jepang menimbulkan sikap anti Jepang di kalangan masyarakat. Negara Jepang bahkan di sebut sebagai "*economic animal*". Dalam artian bahwa Jepang bekerjasama hanya sebatas masalah ekonomi, yaitu masalah untung dan rugi. Sebagaimana masyarakat Bandung yang melaporkan sikap dan perlakuan orang-orang Jepang dalam hal terdapatnya kepincangan perlakuan dan juga pengupahan. Kalangan mahasiswa pun semakin gencar melakukan upaya-upaya dalam mengkritisi kebijakan strategi pembangunan pemerintah. Maka di sepanjang tahun 1970-1973 reaksi kritik dalam bentuk tulisan, seminar dan juga diskusi-diskusi sering mereka lakukan.

Akumulasi sikap anti Jepang semakin menyeruak dengan adanya momentum kedatangan Perdana Menteri Jepang, *Kakuei Tanaka* ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 1974. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dalam menolak dominasi asing. Maka gagasan terhadap penyambutan *Tanaka* di rancang sedemikian rupa oleh mahasiswa yang di pelopori oleh kalangan Dewan Mahasiswa (DM) dari masing-masing Perguruan Tinggi di Jakarta.

Dan puncaknya, setelah gagal merencanakan aksi demonstrasi pada tanggal 14 Januari 1974 dalam menyambut *Tanaka* di Halim Perdanakusumah, para mahasiswa kembali berdemonstrasi turun ke jalan pada tanggal 15-16 Januari 1974. Aksi yang meluas sampai di beberapa sudut ibukota ini menimbulkan kerusuhan, perusakan serta pembakaran gedung-gedung dan perusahaan terutama perusahaan asing yakni Jepang.

Selama dua hari, peristiwa kerusuhan tersebut telah menelan banyak kerugian baik materi maupun non-materi. Aksi demonstrasi yang semula hanya sebagai agenda penyampaian aspirasi terhadap pemerintah dalam mengawal proses pembangunan Orde Baru, berubah menjadi aksi huru-hara massa yang berakhir dengan kejadian yang mencoreng kemurnian gerakan mahasiswa itu sendiri. Peristiwa kelam ini disebut sebagai peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974.

Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 merupakan sebuah kajian yang membahas tentang gerakan mahasiswa. Sepanjang yang penulis ketahui tentang bahasan penelitian-penelitian mengenai gerakan mahasiswa terutama yang fokus pada peristiwa Malari 1974 yang telah diteliti, maka dalam hal ini penulis menyampaikan bahwa penelitian "*Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974*" adalah penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian yang membahas mengenai Malari 1974 lainnya dapat kita lihat misalnya pada penelitian dari Marzuki Arifin "*Peristiwa 15 Januari 1974*", A. Yogaswara "*Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI)*", dan Heru Cahyono, "*Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74*".

Semua penelitian tersebut menjelaskan tentang kejadian mengenai Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974. Namun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini adalah bahwa penelitian mengenai "*Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974*" lebih spesifikasi pada pokok bahasan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya Malari 1974 yang terfokus pada aspek politik meliputi kekuasaan dan kebijakan. Sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan tentang faktor penyebab Malari 1974 di tinjau dari aspek politik. Sedangkan penelitian-penelitian lain yang telah disebutkan, semuanya hanya menggambarkan tentang terjadinya peristiwa tersebut dari sudut pandang masing-masing. Seperti "*Peristiwa 15 Januari 1974*" karangan Marzuki Arifin yang membahas Malari 1974 dari sudut pandang pemerintah yang

menyimpulkan bahwa Malari 1974 terjadi dikarenakan adanya campur tangan PSI dan Masyumi, lalu “*Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI)*” dari A. Yogaswara lebih umum menggambarkan kronologis kejadian tersebut dengan tidak memaparkan secara tegas mengenai tokoh atau dalang dari kejadian tersebut, dan Heru Cahyono, “*Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari ’74*” lebih banyak memaparkan Malari 1974 dari pengetahuan dan pengalamannya sebagai seorang Pangkopkamtib pada masa itu. Dengan demikian jelas di sini bahwa penelitian mengenai “*Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974*” yang penulis lakukan, itu berbeda dan lebih luas kajiannya karena penulis berusaha untuk mengkombinasikan semua data-data sebagai bahan kajian untuk memperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penyebab terjadinya Malari 1974 dari aspek politik.

SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian yang telah di lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 ditinjau dari aspek politik yakni adanya persaingan atau rivalitas di dalam tubuh pemerintahan. Persaingan tersebut terjadi di antara kelompok Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo. Persaingan atau rivalitas kedua kelompok turut ambil bagian di dalam terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974. Pada saat terjadinya peristiwa kerusuhan pada tanggal 15 Januari tersebut, kelompok Ali Moertopo sengaja mengirimkan beberapa oknum yang bukan berstatus mahasiswa di dalam peristiwa tersebut. Diantaranya Roy Simandjuntak yang mengaku mengerahkan para tukang becak serta seorang kyai Nur dari Banten yang sengaja di datangkan untuk menarik massa pada peristiwa yang berujung kerusuhan itu. Sedangkan kelompok Soemitro sengaja membiarkan peristiwa kerusuhan tersebut dengan tidak melakukan penindakan-penindakan tegas, seperti penangkapan. Meskipun akhirnya penangkapan baru di

lakukan setelah dua hari kerusuhan tersebut terjadi.

Selain itu, adanya penolakan terhadap dominasi perusahaan asing yang diwujudkan dalam aneka macam seruan. Seperti dalam bentuk kritikan atau masukan dari beberapa ahli ekonom, tulisan-tulisan beberapa surat kabar, diskusi-diskusi serta aksi demonstrasi yang di lakukan oleh berbagai kalangan terutama mahasiswa. Reaksi penolakan terhadap dominasi perusahaan asing sudah gencar di lakukan semenjak tahun 1970 hingga 1973. Aksi pengeluaran Petisi Oktober 1973, aksi penyambutan Ketua IGGI, aksi diskusi untung-rugi modal asing yang menghasilkan “Ikrar Warganegara” serta puncak dari akumulasi reaksi tersebut semakin meningkat dengan adanya momentum kedatangan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia pada tanggal 14-17 Januari 1974. Dan puncak kejadian kerusuhan tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari yang di kenal sebagai peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Rum. 2004. *Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter, Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung di Panggung Politik Indonesia 1970-1974*. Kompas : Jakarta.
- Arifin, Marzuki. 1974. *Peristiwa 15 Januari 1974*. Publishing House Indonesia : Jakarta.
- A. Yogaswara. 2009. *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (MALARI)*. Media Pressindo : Yogyakarta.
- . 2007. *Biografi Daripada Soeharto, Dari Kemusuk Hingga “Kudeta Camdessus”*. Media Pressindo : Yogyakarta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Penelitian Kualitatif*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Cahyono, Heru. 1998. *Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15*

- Januari '74. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Culla, Adi Suryadi. 1999. *Patah Tumbuh Hilang Berganti : Sketsa Pegolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia (1908-1998)*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Departemen Pertanian. 1994. *Presiden Soeharto dan Pembangunan Pertanian*. PT. Citra Media Persada : Jakarta.
- Dwipayana, G. dan Ramadhan K.H. 1989. *Soeharto : Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Persada : Jakarta.
- Haryanto, Ignatius. 2006. *Indonesia Raya Dibredel*. PT.LKIS Pelangi Aksara : Yogyakarta.
- Jenderal Soeharto. 1967. *Orde baru (Kutipan dari Pidato Pejabat Presiden Soeharto pada Sidang Paripurna Kabinet Ampera tanggal 19 April 1967)*. Grip : Surabaya.
- Mangunkusumo, Daliso dkk. 1999. *Penjara-politik Indonesia*. Prospek : Yogyakarta.
- Moeleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Muhaimin, Yahya. 1991. *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. LP3ES : Jakarta.
- Nindarsari. 1984. *Implikasi Politik Penanaman Modal Jepang di Indonesia 1970-1979*. FISIP Universitas Indonesia.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Inti Indayu : Jakarta.
- Rahmat, M. Aref. 2011. *Ali Moertopo dan Dunia Intelijen Indonesia*. Narasi : Yogyakarta.
- Sayuti, Husin. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*. CV. Fajar Agung : Jakarta.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- peristiwamalari-1974-blogspot.com - youtube Diakses pada 28 Desember 2012.